



## CATATAN PILKADA SERENTAK 9 DESEMBER 2015

Debora Sanur L\*)

### Abstrak

*Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, telah berjalan dengan lancar dan aman. Namun demikian, ada dua fenomena penting yang dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan demokrasi dalam pilkada serentak kali ini. Fenomena tersebut ialah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat serta lebih menonjolnya figur calon daripada partai pengusungnya. Oleh sebab itu, demi perbaikan sistem pemilihan ke depan, terjadinya fenomena tersebut perlu diketahui penyebabnya.*

### Pendahuluan

Beberapa fungsi pemilihan umum yang juga menjadi fungsi pilkada dalam sebuah negara demokratis menurut Dieter Nohlen ialah untuk melegitimasi sebuah pemerintahan baik yang berasal dari satu partai maupun multipartai yang tergabung dalam sebuah koalisi, dengan cara mengundang pola persaingan dalam perebutan kekuasaan dengan cara menawarkan program-program, serta membentuk suatu kekuatan politik bersama yang mampu beraksi bagi masyarakat. Sama halnya dengan pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu. Pilkada tersebut dimaksudkan untuk membentuk sebuah pemerintahan bagi masing-masing daerah agar daerah tersebut secara demokratis memiliki pemimpin dengan kekuatan politik

dan program-program terbaiknya bagi masyarakat daerah.

Sejak awal persiapannya, pilkada serentak direncanakan untuk melakukan pemilihan terhadap 269 kepala daerah, yang terdiri dari 9 pemilihan gubernur pada tingkat propinsi, 30 pemilihan wali kota pada tingkat kota, dan 224 pemilihan bupati pada tingkat kabupaten. Namun demikian, pada saat hari pelaksanaan, ternyata Pilkada serentak ini hanya dapat melaksanakan di 264 daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pelaksanaan pilkada di 5 daerah yang tidak memungkinkan untuk turut melaksanakan pilkada. Kelima daerah tersebut ialah Kabupaten Simalungun, Kabupaten Pematang Siantar, Kabupaten Fak-Fak, Kota Manado dan Provinsi Kalimantan Tengah.

\*) Peneliti Muda Bidang Politik Dalam Negeri, pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Email [Debora\\_sanur@yahoo.com](mailto:Debora_sanur@yahoo.com).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)  
Sekretariat Jenderal DPR RI  
[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)  
ISSN 2088-2351



9 772088 235001

Walaupun pilkada serentak tersebut dinilai sudah berjalan dengan tenang, aman dan lancar, beberapa hal tetap perlu dievaluasi terkait pelaksanaannya. Ada dua fenomena penting yang dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan demokrasi dalam pilkada serentak kali ini. Fenomena tersebut ialah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan lebih menonjolnya figur calon daripada partai pengusungnya.

Dalam pilkada serentak ini tingkat partisipasi pemilih dapat dikatakan masih rendah. Di beberapa daerah partisipasi pemilih hanya berkisar 50-65 persen. Bahkan, di beberapa daerah ada yang dibawah 50 persen. Partisipasi politik yang rendah yang ditandai dengan kehadiran pemilih di TPS kurang dari 50 persen seperti di Tangerang Selatan, Depok, Cianjur, Semarang, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Boyolali, Sragen, Kodya Solo, Maluku Utara, Wonogiri.

Sama halnya dengan masalah kapabilitas parpol dalam mengusung calon yang juga perlu mendapat perhatian. Berdasarkan hasil hitung cepat banyak calon yang berhasil menggeser nama besar parpol dalam pertarungan di pilkada serentak ini. Kredibilitas Parpol dapat dikatakan tidak sejalan dengan peluang calon untuk menang dalam pilkada.

## Partisipasi Masyarakat dan Kemenangan Petahana

Pilkada, merupakan salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam sebuah proses politik di daerah. Oleh karenanya penyelenggaraan pilkada yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan dalam sebuah daerah, karena pilkada merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Maka, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pilkada ini seperti halnya pemilihan presiden maupun legislatif. Masyarakat menjadi faktor utama dan penentu suksesnya pelaksanaan pemilu.

Ada beberapa penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak ini. Penyebab tersebut di antaranya karena imbas dari kampanye para calon yang dibiayai negara, sehingga arus informasi kepada pemilih menjadi lebih lemah. Namun bisa juga akibat dekatnya jarak antara Pilkada serentak 2015 dengan

pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014 sehingga membuat masyarakat pemilih mengalami kejenuhan. Sesuai dengan konsep yang diutarakan oleh Downs, ia menilai bahwa seorang pemilih biasa umumnya tidak memiliki informasi yang baik terkait kandidat calon. Pemilih juga umumnya tidak berusaha mengetahui kapasitas masing-masing calon untuk dapat mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan mereka. Sehingga pada akhirnya para pemilih tersebut hanya mengikuti pendapat para ahli politik, ajakan atau tidak memilih sama sekali.

Yang menarik, menurut penilaian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) rendahnya partisipasi pemilih membuat *incumbent* (petahana) lebih mudah untuk memenangkan pilkada. Berdasarkan penghitungan cepat (*quick count*) yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) di 21 wilayah, LSI mencatat 70 persen pemenang Pilkada masih di kuasai oleh petahana baik ditingkat gubernur, bupati, ataupun wali kota. Sedangkan sisanya, dimenangkan oleh artis atau politisi.

Menurut V. O Key pemilih akan menetapkan pilihannya dengan cara memberi penilaian terhadap kinerja kandidat. Pemilih akan menilai apakah petahana sudah berkinerja secara baik atau belum bagi dirinya sendiri ataupun bagi daerah. Pemilih juga akan menilai kapabilitas sosok calon tersebut apabila ia dibandingkan dengan sosok pemimpin dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Konsep ini sama halnya dengan kemenangan petahana di sejumlah daerah. Para calon petahana ini telah memiliki sumber daya politik yang lebih besar dan lebih siap secara finansial bila dibanding calon lainnya. Ia telah memiliki investasi politik selama menjabat menjadi kepala daerah karena sudah dikenal. Masyarakat pemilihpun umumnya hanya mengenal petahana sebagai pemimpin di daerahnya. Oleh sebab itu, kecenderungan dari masyarakat yang tidak mau repot mencari tahu tentang kapasitas calon lainnya tentu akan dengan mudah memilih petahana. Atau pemilih memilih untuk tidak memilih sama sekali karena menurutnya tidak ada pasangan calon yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Kemenangan petahana yang tinggi di

seluruh daerah pilkada ini tidak lepas dari kelebihan lain yang ia miliki bila dibanding dengan rivalnya. Petahana dianggap lebih menguasai dan mampu menjangkau semua segmen pemilih. Sehingga, walaupun mungkin para pemilih tidak cukup familiar bahkan tidak merasa diuntungkan secara langsung oleh kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh para petahana pada periode kepemimpinannya yang lalu. Namun demikian, karena petahana lebih mampu menggerakkan tokoh-tokoh termasuk birokrasi, para tokoh dan birokrasi ini yang mengajak masyarakat pemilih di akar rumput untuk kembali memilih petahana. Demikian pula dengan terkait artis sebagai sosok yang populer namun dalam hal kemenangannya juga dipengaruhi adanya unsur petahana. Seperti artis Zumi Zola dengan rekam jejaknya sebagai Bupati di Tanjung Jambung Timur. Selain itu, Sigit Purnomo (Pasha Ungu) calon Wakil Walikota Palu yang berpasangan dengan Hidayat sebagai calon Walikota Palu yang merupakan birokrat yang sudah dikenal masyarakat.

Menurut Downs pemilih rasional ialah pemilih yang sebenarnya hanya mengikuti kepentingannya sendiri, dimana pemilih tersebut akan mencari informasi yang lengkap terkait kandidat calon dan akan mencari alternatif pilihan yang terbaik. Oleh sebab itu, dalam pilkada kandidat calon yang akan dipilih seharusnya adalah kandidat yang menawarkan keuntungan terbesar apabila calon tersebut berkuasa. Dan bila keuntungan yang ditawarkan sama saja diantara alternatif-alternatif yang ada, maka kandidat tersebut tidak akan dipilih. Sama halnya dengan yang terjadi dalam pilkada serentak kali ini, karena dalam daerah pilkada pasangan calon rival petahana tidak mampu menawarkan keuntungan yang lebih maka masyarakat memilih untuk tidak memilih mereka, dan akhirnya kembali memilih petahana atau tidak turut serta dalam pemilihan.

### Kapabilitas Parpol

Sebagaimana konsep demokrasi modern, partai-partai politik merupakan sarana kelembagaan yang utama untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Namun demikian, dalam pilkada serentak ini, pemilih lebih

menilai faktor figur calon daripada partai-partai pengusung maupun pendukungnya. Fenomena ini dapat menjadi tren positif sekaligus negatif bagi keberhasilan pilkada. Menjadi tren positif karena pemilih dapat dikategorikan sebagai pemilih rasional yang memilih berdasarkan figur yang dianggap layak. Sesuai dengan yang di katakan oleh V. O Key, pemilih rasional ialah pemilih yang dapat memilih berdasarkan kompetensi masing-masing partai ataupun kandidat calon berdasarkan kemampuan dalam memimpin atau dalam memecahkan permasalahan yang muncul di daerahnya. Sebaliknya, menjadi tren negatif karena ternyata dalam memilih masyarakat tidak memperdulikan partai-partai di belakang sosok calon tersebut.

Menurut Direktur Populi Center Nico Harjanto sebenarnya parpol merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam pemilihan kepala daerah 2015. Namun di sisi lain parpol terkesan menjadi pihak yang paling tidak siap untuk mengikuti pilkada ini. Banyak parpol yang tidak mendukung kader-kader terbaiknya maju dalam pilkada. Bahkan cenderung berkoalisi dengan pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai-partai yang ideologinya sangat berbeda dengannya. Hal ini tentu merugikan masa depan partai dan ideologinya serta hakikat dari demokrasi itu sendiri.

Ketidaksiapan partai dalam mendukung calon hingga ke masyarakat akar rumput ini pula yang membawa pilkada serentak dekat dengan aksi politik uang (*money politics*) di sejumlah daerah. Terjadinya praktik politik transaksional mengisyaratkan bahwa tanggung jawab calon kepada pemilih hanya sebatas sejumlah uang untuk pencoblosan saja. Hal ini bukan hanya merugikan masyarakat dan negara namun juga mengancam keberlangsungan demokrasi yang sehat di negara kita. Terlebih jika sudah terpilih calon akan lebih mudah melakukan korupsi untuk balik modal.

Oleh sebab itu pada masa mendatang parpol sudah seharusnya dapat melakukan proses rekrutmen kader calon kepala daerahnya dengan lebih baik. Bahkan memajukan kader yang memang sudah kenal bahkan dimajukan atas usulan masyarakat setempat. Dengan demikian kualitas demokrasi melalui pemilu maupun pilkada

semakin meningkat. Baik melalui semakin tingginya partisipasi dari masyarakat pemilih rasional, maupun dari peningkatan kapasitas parpol sebagai kendaraan politik demokratis dalam pemilu ataupun pilkada.

## Penutup

Secara umum pilkada serentak 9 Desember 2015 telah berjalan dengan baik dan tertib. Namun harus tetap ada evaluasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemui. Dua hal penting yang perlu menjadi perhatian khusus ialah terkait rendahnya partisipasi politik pemilih, dan Kredibilitas parpol yang tidak sejalan dengan peluang calon untuk menang dalam pilkada. Kemampuan partai sebagai subyek dalam pemilu perlu dievaluasi untuk menghadapi pemilu-pemilu berikutnya agar parpol dapat menghadirkan calon yang berkualitas dan juga ikut mencerdaskan pemilih. Untuk itu, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas agar pemilih rasional meningkat jumlahnya.

## Referensi

- Dodi Ambardi, ed.. 2008. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*, Friedrich Naumann Stiftung fur Die Freiheit, Jakarta, hal. 48-50.
- Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W. Kusumah, (ed: A. Josias Simon R. dan Aldrin Situmeang). 2002. *Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden: Suatu Studi Banding*, KIPP Eropa, Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) dan Indonesian Society for Democracy and People Employment (INSIDE), Jakarta, hal 2-3.
- Ini Catatan Bawaslu Atas Penyelenggaraan Pilkada Serentak, <http://pilkada.kompas.com/read/2015/12/10/09403211/Ini.Catatan.Bawaslu.Atas.Penyelenggaraan.Pilkada.Serentak>, diakses tanggal 10 Desember 2015.
- LSI 70 Persen Incumbet Memenangkan Pilkada, <http://www.harianterbit.com/hanterpolitik/read/2015/12/10/50078/41/41/LSI-70-Persen-Incumbet-Memenangkan-Pilkada>, diakses tanggal 10 Desember 2015.
- Meski Ada Hambatan KPU Tetap Nyatakan Pilkada Serentak Lancar, <http://pilkada.kompas.com/read/2015/12/09/21392671/Meski.Ada.Hambatan.KPU.Tetap.Nyatakan.Pilkada.Serentak.Lancar>, diakses tanggal 10 Desember 2015.
- Partai Politik Disebut Paling Tidak Siap Pilkada Serentak, <http://pilkada.tempo.co/read/news/2015/12/05/304725228/partai-politik-disebut-paling-tidak-siap-pilkada-serentak>, diakses tanggal 10 Desember 2015.
- Pilkada 2015 Calon Petahana Diuntungkan Atas Rendahnya PartisipasiPemilih, <http://www.harianterbit.com/hanterpolitik/read/2015/12/10/50045/41/41/Pilkada-2015-Calon-Petahana-Diuntungkan-Atas-Rendahnya-Partisipasi-Pemilih>, diakses tanggal 10 Desember 2015.